

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS SOSIAL
KOTA BIMA**

TAHUN 2019-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bima periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Dinas Sosial disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2013-2018. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global; dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi, misi Kota Bima sebagaimana diamanatkan didalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2019-2023, yaitu “ Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera “ maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap karyawan Dinas Sosial untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Sosial Kota Bima yang lebih baik lagi.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BIMA,



Drs. H. Muhidin, MM
NIP. 19631231 199003 1 209

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
B. Sumber daya Perangkat Daerah	13
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
C. Telaah RENSTRA K/L dan RENTSRA Provinsi.....	28
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	31
E. Penentuan Isu-Isus Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan. Pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkelanjutan dan memberdayakan bagi penduduk miskin serta penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS). Perlindungan social merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan social untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Perlindungan social dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko sehingga mampu meningkatkan status social dan hak-hak warga Negara. Dalam tataran praktis perlindungan social merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga Negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari resiko-resiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Kebijakan tentang perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD RI Tahun 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus dibedakan sesuai martabat dan ases kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kehidupan dasar untuk hidup sejahtera. Selanjutnya pasal 34 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, maka Negara wajib mengembangkan system perlindungan social yang bersifat nasional, komprehensif dan mensejahterakan rakyat.

Selanjutnya, penanganan kemiskinan dan PMKS periode 2019-2023 harus dapat diimplementasikan dengan menggunakan seperangkat regulasi yang ada. Karena itu penanganan kemiskinan dan PMKS harus dimasukkan kedalam perencanaan strategis. Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Organisasi perangkat daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan OPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum OPD.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pembuatan RENSTRA diwajibkan untuk disusun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dinas Sosial Kota Bima merupakan salah satu OPD yang diwajibkan menyusun RENSTRA tersebut. Penyusunan Rencana strategis dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama 5 (Lima) tahun kerja (periode 2019-2023) dengan melihat potensi dan daya dukung baik internal maupun eksternal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kota Bima maksud untuk memberi arah program pembangunan, dan penyusunan program bidang kesejahteraan sosial selama lima tahun kedepan.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bima. Dinas Sosial Kota Bima adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
2. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun program dan kegiatan sosial.
3. Menyelenggarakan Penanganan Fakir miskin, Pemberdayaan kelembagaan Sosial serta Penyuluhan sosial dan kepahlawanan.
4. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial diantaranya pembinaan anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang cacat dan rehabilitasi tuna social yang meliputi PSK, pengemis, gelandangan dan eks narapidana.
5. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan bantuan sosial terhadap keluarga miskin, korban bencana alam, korban tindak kekerasan.
6. Menyelenggarakan bimbingan organisasi dan bantuan sosial.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bima Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bima sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - c. Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Jaminan Sosial
 - b. Seksi Perlindungan Sosial
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
5. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Pembinaan Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rahabilitasi Tuna Sosial
 - c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Kota Bima menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi daerah.
- b. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesejahteraan Sosial.
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.
- e. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial.
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan Sosial.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas ;
 - b. Pelaksana pelayanan teknis administrasi lingkup Dinas ;
 - c. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, pedoman dan pelaporan serta keuangan;
 - d. Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja Dinas ;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.
3. Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
 - c.

B. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas di bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang.
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.
 - c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang.
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi Pembinaan anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang cacat dan rehabilitasi tuna sosial.
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya dan.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan anak dan lanjut usia
 - b. Seksi Rehabilitasi penyandang cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi tuna sosial.
 3. Pada Seksi Pembinaan anak dan lanjut usia mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan anak dan lanjut usia.
 4. Pada Seksi Rehabilitasi penyandang cacat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Rehabilitasi penyandang cacat.
 5. Pada Seksi Rehabilitasi tuna sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang Rehabilitasi tuna sosial.

C. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di bidang fakir miskin dan pemberdayaan kelembagaan sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang.
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.
 - c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang.
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi pemberdayaan

- social, Penanganan Fakir Miskin, Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan.
- e. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya dan.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - d. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan
 - e. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan
 - f. Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan.
 4. Pada Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.
 5. Pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial .
 6. Pada Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang penyuluhan sosial dan keahlawanan.

D. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

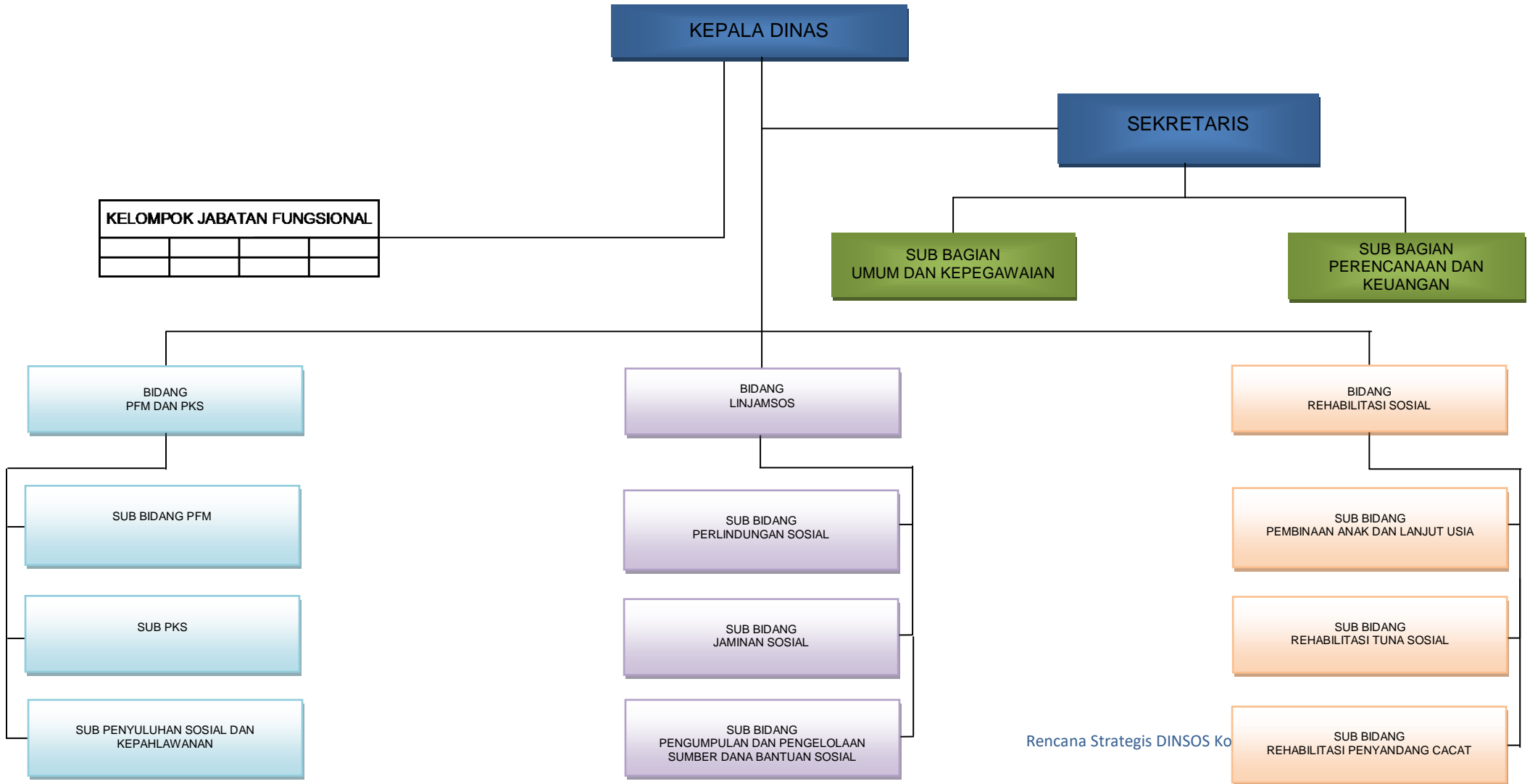
1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang.
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.
 - c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang.
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya dan.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial dan

- b. Seksi Jaminan Sosial dan
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
4. Pada Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.
 5. Pada Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Jaminan Sosial.
 6. Pada Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

2.1.4 Kelompok Jabatan Struktural.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bima



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Dinas Sosial Kota Bima memiliki 27 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan		
		SLTA	D3	S1	S2	Pria	Wanita	II	III	IV
1	Dinas Sosial Kota Bima	3	2	20	2	14	13	2	20	5

Selain itu terdapat 6 orang tenaga honorer/kontrak dan 7 orang pegawai sukarela yang mendukung kegiatan-kegiatan kedinasan. Sedangkan untuk menyukseskan program di tingkat Kelurahan Dinas Sosial Kota Bima memiliki mitra kerja yakni Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Pendamping KUBE, Pendamping Cacat, dll yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

- A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :
 1. Golongan IV : 5 (lima) orang
 2. Golongan III : 22 (dua puluh dua) orang
 3. Golongan II : 2 (dua) orang
- B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala Dinas Sosial
 2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Dinas Sosial

3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kabid. Rehabilitasi Sosial, Kabid. Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, dan Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 4. Eselon IV a : 11 (sebelas) orang, terdiri atas 2 (dua) orang kasubbag dan 9 (sembilan) orang kasi.
 5. Staf terdiri atas 13 (tiga belas) orang.
- C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :
1. Strata 2 (S2) : 3 (tiga) orang
 2. Strata 1 (S1) : 23 (dua puluh tiga) orang
 3. Diploma 3 : 1 (satu) orang
 4. SLTA : 2 (dua) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2019, keadaan pegawai pada Dinas Sosial Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	3	10,34%
2.	S1	23	79,32%
3.	D3	1	3,44%
4.	SMA / sederajat	2	6,90%
Total		29	100%

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	5	17,24%
2.	Golongan III	22	75,86%
3.	Golongan II	2	6,90%
4.	Golongan I	-	-
Total		29	100%

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	3,45%
2.	Eselon III	4	13,79%
3.	Eselon IV	12	41,38%
4.	Non-Eselonering	12	41,38%
Total		29	100%

2.2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Dinas Sosial Kota Bima terletak di Jalan Duku No. 1 Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai

dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Sosialpun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor, scanner;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil rescue, mobil dunlap, mobil tangki air bersih dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selama tahun 2018-2023. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bima serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2014-2018 , dapat dilihat pada **(halaman lampiran)**.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

- 1). Secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Bima masih terbatas, hal itu tidak seimbang dengan besarnya jumlah permasalahan sosial yang harus ditangani
- 2). Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bima sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang sistematis.
- 3). Jumlah sarana dan prasarana terbatas seperti gudang bencana, kantor, kendaraan dinas, dan lainnya.
- 4). Kebutuhan masyarakat terhadap bantuan dan pelayanan sosial akan terus meningkat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat.
- 5). Meningkatnya jumlah penduduk miskin sebagai akibat dari krisis ekonomi.

b. Peluang

- 1) Potensi penduduk Kota Bima dapat menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Respon pekerja sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Organisasi Sosial, dan Swasta Kota Bima sangat mendukung pelaksanaan pelayanan sosial. Kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensinya semakin meningkat.
- 3) Semangat kegotong-royongan dan kekeluargaan pada masyarakat Kota Bima masih kuat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Bima masih perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil rekapitulasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, jumlah penduduk miskin di Kota Bima dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1a
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Tahun 2013 s.d 2017

Kota Bima	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	17.362	16.412	15.734	15.511	15.134
Tingkat Kemiskinan (%)	9,91	9,74	9,85	9,51	9,27

Sumber : Bappeda Kota Bima

2. Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bima sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang sistematis. Saat ini jumlah PMKS di Kota Bima semakin meningkat sebanyak 14.705 PMKS dari kondisi sebelumnya 9.334 PMKS, sementara yang tertangani sejumlah 9.836 orang (66,88 % dari 14.705).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut dapat dirinci sesuai tabel berikut:

Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kemiskinan	8,60 %	Menurunnya persentase atau jumlah kemiskinan	Pelayanan terhadap keluarga miskin	Kondisi data yang kurang valid	Pelayanan terhadap keluarga miskin cenderung bias dan memicu konflik sosial.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	14.705 Orang	Tertangani jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan menjadi kewenangan lintas sektor	Pelaksanaan pelayanan cenderung tumpang tindih

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah :

"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri".

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut :

Bagian pertama : *Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA*

- a. Kota Bima yang berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. Dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- **Masyarakat Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan kondisi dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadilan social ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan pada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggi.
- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggung jawaban terhadap pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan Kelola Pemerintahan yang baik yang sungguh-sungguh bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien dan pertisipatif.
- **Lingkungan Perkotaan yang Ramah** adalah lingkungan kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumberdaya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat agamais adalah masyarakat yang bertakwa, mematuhi aturan hokum, memelihara kurikulum internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri.

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapaun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Masyarakat yang maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per capital angka kemiskinan, indeks Pemenuhan kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat, Tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan indeks pembangunan manusia yang mencakup : Tingkat Pendidikan Penduduk, tingkat partisipasi sekolah, daya serap lembaga pendidikan formal, usia harapan hidup penduduk, lama hari sakit penduduk, status gizi balita, tingkat kematian bayi dan ibu hamil dan nisbah sarana kesehatan per penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiscal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan

otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat ekonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan indeks kemampuan rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah propinsi dan pusat.

Misi Pembangunan Kota Bima tahun 2019-2023

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut , maka dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan.
3. Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan Resiko Bencana.
5. Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter dan Agamais.

Penetapan Visi Dinas Sosial Kota Bima yang ingin “Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera“, dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2019-2023. Misi dalam RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah misi mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan.

Menelaah visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ini ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut.

Berdasarkan telaah visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2019-2023 tersebut dapat dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bima sesuai tabel berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “mewujudkan kota bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri”				
No.	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Pengembangan Produk Unggul.	Rendahnya cakupan pelayanan	Minimnya anggaran	Masih tersedianya anggaran yang cukup

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaah RENSTRA K/L terdapat isu-isu, diantaranya:

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal, baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) wanita rawan sosial ekonomi; (3) masyarakat yang tinggal di daerah kumuh.
2. Ketelantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami ketelantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita

terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.

3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda.
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian secara normative, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkoba, (5) gelandangan, (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
5. Keterasingan/keterpencilan dan/atau berada dalam lingkungan yang terisolasi, yakni warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.
6. Korban Bencana, meliputi korban bencana alam, bencana sosial.
7. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti; (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban kekerasan, dan (4) pekerja migrant korban tindak kekerasan.
8. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) PSM, (2) Karang Taruna, (3) Orsos/LSM, dan (4) WKSBM (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), (6) Dunia Usaha

Berdasarkan telaahan RENSTRA tersebut maka dapat dianalisis permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya pada Dinas Sosial Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunkan Jumlah penduduk miskin dan rentan	Data Keluarga miskin yang belum valid	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya anggaran pendataan - Makin bertambahnya data keluarga miskin akibat korban bencana banjir 	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
2.	Sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Rendahnya cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan Sosial 	Masih cukupnya ketersediaan dana untuk peningkatan SDM

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rendahnya cakupan pelayanan	- Minimnya anggaran - Data PMKS blm valid	Masih cukupnya ketersediaan dana dan SDM yang memadai
		Lambatnya pelayanan	Minimnya kendaraan operasional	Masih tersedianya kendaraan dinas pribadi guna membantu kelancaran tugas kedinasan

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Untuk mewujudkan keserasian antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial diperlukan sinkronisasi arah pembangunan sosial. Selanjutnya permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sesuai tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bahwa kondisi lingkungan fisik pada masyarakat yang mengalami Kerentanan Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, dan Korban bencana perlu penataan ruang agar pembangunan fisik dan pembangunan sosial dapat saling mendukung	Masih kumuhnya kondisi lingkungan fisik pada masyarakat yang mengalami Kerentanan Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, dan Korban bencana	Minimnya anggaran	Masih adanya dukungan anggaran APBN, Dekonsentrasi, dan Pembantuan
			Rendahnya cakupan pelayanan	Masih tersedianya kendaraan dinas pribadi guna membantu kelancaran tugas kedinasan

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS, sesuai tabel berikut:

Tabel 3.4.2

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penataan lingkungan yang kumuh akibat bencana banjir melalui program Tanggap darurat	SDM aparatur kurang produktif	Rendahnya kesadaran masyarakat dilingkungan kumuh	Adanya kepedulian sebagian masyarakat disekitar lingkungan kumuh
		Rendahnya cakupan pelayanan	Minimnya anggaran	Masih tersedianya anggaran yang cukup

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2023, yakni:

- a) Peningkatan kemandirian Keluarga Fakir Miskin dan Pendamping melalui Program Bantuan Sosial.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi rehabilitasi sosial yang terdiri dari pembinaan anak terlantar dan lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas, Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bima, perlindungan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH), perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial merupakan penjabaran strategis operasional dari sasaran strategis Kota Bima tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima yang ringkasan adalah sebagai berikut.

Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2019-2023

Adapun visi Kota Bima untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***"

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;

- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : ***menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan

Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yang akan dijelaskan pada tabel V.2.

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang relevan dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bima tahun 2018-2023 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima
Tahun 2018-2023

VI : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju
SI masyarakat Maju dan Mandiri

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mandiri	Persen (%)	20	25	28	30	40	50	60	60

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bima yaitu :

Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Sosial Kota Bima :

Tabel 4.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mandiri	60%	1.	Menurunnya PMKS	Persentase penurunan PMKS	28 %	30 %	40 %	50 %	60 %

4.2 DEFINISI OPERASIONAL

4.2.1 Definisi Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Bima

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Dinas Sosial untuk mengukur sejauh mana vixi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran strategis Dinas Sosial adalah **“Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS’**. Hal ini dimaksud adalah Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga komunitas dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada :

1. Anak Balita terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Nakal
4. Anak Jalanan
5. Wanita rawan sosial ekonomi
6. Korban tindak kekerasan
7. Lanjut usia terlantar
8. Penyandang Cacat
9. Tuna Sosila
10. Pengemis
11. Gelandangan
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
13. Korban Penyalahgunaan Napza
14. Keluarga Fakir Miskin
15. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
16. Komunitas Adat Terpencil
17. Korban Bencana Alam
18. Korban Bencana Sosial
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
20. Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)
21. Keluarga Rentan

4.3 Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial

Adapun Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah Persentase penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun N-I dikurangi Jumlah PMKS th N}}{\text{Jumlah PMKS tahun N-1}} \times 100$$

4.4 Cara Penetapan Target

Pada tahun 2019 data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebanyak 14.705 PMKS dan mengalami penurunan hingga pada angka 13.224 jumlah PMKS pada tahun 2020 atau sebesar 10,07 %. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML PMKS	JML PENURUNAN ANGKA PMKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Anak Balita Terlantar	0	0
2	Anak Terlantar	305	305
3	Anak Nakal	0	0
4	Anak Jalanan	0	0
5	Wanita rawan Sosial Ekonomi	0	0
6	Korban Tindak Kekerasan	80	80
7	Lanjut Usia Terlantar	2804	2804
8	Penyandang Cacat	907	907
9	Tuna Susila	0	0
10	Pengemis	0	0
11	Gelandangan	0	0
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLK)	350	350
13	Korban Penyalahgunaan Napza	224	224
14	Keluarga Fakir Miskin	9618	8418
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0
16	Komunitas Adat Terpencil	0	0
17	Korban Bencana Alam	221	0
18	Korban Bencana Sosial	136	136
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	60	0
20	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0
21	Keluarga Rentan	0	0
	Total	14.705	13.224

Dari data di atas dapat kami simpulkan untuk penentuan target tahun berikutnya tingkat penurunan PMKS sebesar 10%.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

- a. Memberikan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
- b. Memberikan bantuan modal usaha bagi PMKS.
- c. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Kebijakan

Kebijakan pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup:

- a. Memberikan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
- b. Memberikan bantuan modal usaha bagi PMKS.
- c. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI II : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan.			
I. Untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1 Menurunnya . PMKS	1 Memberikan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS	1. Memberikan Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Program BPNT, PKH dan bantuan sembako bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan lansia dan PMKS lainnya.
		2 Memberikan bantuan modal usaha bagi PMKS.	2. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi PMKS
		3 Meningkatkan kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	3. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Bima yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Dalam rangka mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial, maka ditetapkan sejumlah program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
 - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
 - Bimbingan Teknis Kelompok Usaha bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin
 - Pelatihan tenaga pendamping social pemberdayaan fakir miskin
 - Penyuluhan Sosial
 - Pemberian bantuan pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan kube jasa
 - Pemberian bantuan Modal usaha bagi kelompok usaha bersama
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial
3. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - Pendayagunaan Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma
 - Penyusunan Rancangan Perda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
 - Gebyar penyandang disabilitas

- Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar
 - Pelayanan Psikosial terhadap Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
 - Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi Lansia
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Bantuan Sosial bencana
 - Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)
 - Pelaksanaan kegiatan keserasian social
 - Sosialisasi UGB
 - Pelayanan JKN-PBI

Selain program dan kegiatan pokok tersebut, ditetapkan pula sejumlah program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial Kota Bima, antara lain dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makan dan minum
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semester
- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah
- Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD

Adapun untuk uraian yang lebih detil mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Sosial tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada **(halaman Lampiran)**.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan . Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Bima dalam rentang lima tahun (2019-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

**Tabel Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima
Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penurunan PMKS	25%	28%	30%	40%	50%	60%	60%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
1	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 06 01 00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	702,94	100%	773,23	100%	850,55	100%	935,61	100%	1.029,17	100%	1.132,09	Dinsos	Kota Bima			
				1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	Cakupan surat yang terkirim selama 1 tahun	100	100	101,68	100	111,85	100	123,03	100	135,34	100	148,87	100	163,76	Dinsos				
				1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	Cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	100	24,36	100	26,80	100	29,48	100	32,42	100	35,67	100	39,23	Dinsos				
				1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan pajak)	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	100	100	29,50	100	32,45	100	35,70	100	39,26	100	43,19	100	47,51	Dinsos				
				1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi)	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan	100	100	82,18	100	90,40	100	99,44	100	109,38	100	120,32	100	132,35	Dinsos				
				1 06 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100	100	13,37	100	14,71	100	16,18	100	17,80	100	19,58	100	21,53	Dinsos				
				1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Penyediaan ATK	100	100	53,24	100	58,56	100	64,42	100	70,86	100	77,95	100	85,74	Dinsos				
				1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penggandaan dan cetak bahan	100	100	27,33	100	30,06	100	33,07	100	36,37	100	40,01	100	44,01	Dinsos				
				1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik	100	100	7,43	100	8,18	100	8,99	100	9,89	100	10,88	100	11,97	Dinsos				
				1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	62,85	100	69,14	100	76,05	100	83,65	100	92,02	100	101,22	Dinsos				
				1 06 01 14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	8,00	100	8,80	100	9,68	100	10,65	100	11,71	100	12,88	Dinsos				
				1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan kerjasama dengan media	100	100	12,00	100	13,20	100	14,52	100	15,97	100	17,57	100	19,33	Dinsos				
				1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Kegiatan makan minum rapat	100	100	27,00	100	29,70	100	32,67	100	35,94	100	39,53	100	43,48	Dinsos				
				1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	254,00	100	279,40	100	307,34	100	338,07	100	371,88	100	409,07	Dinsos				
				1 06 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos				
				2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 06 02 00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	85,25	100%	93,78	100%	103,15	100%	113,47	100%	124,81	100%	137,30	Dinsos	Kota Bima
							1 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Cakupan Kendaraan Dinas Baru	1	1	40,00	1	44,00	0	48,40	1	53,24	1	58,56	1	64,42	Dinsos	
							1 06 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Perlengkapan Gedung kantor	35	35	7,25	25	7,98	30	8,77	30	9,65	35	10,61	35	11,68	Dinsos	
							1 06 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	6	6	3,00	0	3,30	5	3,63	6	3,99	6	4,39	6	4,83	Dinsos	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
3			1 06 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi/deluhara	100%	100%	25,00	100%	27,50	100%	30,25	100%	33,28	100%	36,60	100%	40,26	Dinsos				
			1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12	12	10,00	12	11,00	12	12,10	12	13,31	12	14,64	12	16,11	Dinsos				
	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	1 06 03 00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	27	100%	51	100%	51	100%	51	100%	51	100%	51	Dinsos	Kota Bima			
			1 06 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Cakupan pakaian dinas beserta perlengkapan aparatur yang seragam	0%	13 stel	0	13 stel	3	13 stel	3	13 stel	3	13 stel	3	13 stel	3					
			1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Cakupan pakaian khusus hari-hari tertentu	40 stel	40 stel	20,00	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	Dinsos		
			1 06 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Cakupan pakaian olahraga aparatur yang seragam	40 stel	40 stel	6,75	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80	40 stel	23,80			
4	Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	1 06 06 00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LKIP OPD	B	BB	185	A	185	A	185	A	185	AA	185	AA	185	Dinsos	Kota Bima			
			1 06 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang harus disediakan	2 dok	2 dok	34,42	2 dok	34,42	2 dok	34,42	2 dok	34,42	2 dok	34,42	2 dok	34,42	2 dok	34,42	Dinsos		
			1 06 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester	1 dok	1 dok	15,69	1 dok	15,69	1 dok	15,69	1 dok	15,69	1 dok	15,69	1 dok	15,69	1 dok	15,69	Dinsos		
			1 06 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	1 dok	15,44	1 dok	15,44	1 dok	15,44	1 dok	15,44	1 dok	15,44	1 dok	15,44	1 dok	15,44	Dinsos		
			1 06 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	19,90	1 dok	19,90	1 dok	19,90	1 dok	19,90	1 dok	19,90	1 dok	19,90	1 dok	19,90	Dinsos		
			1 06 06 05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Berangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA	4 dok	4 dok	75,86	4 dok	75,86	4 dok	75,86	4 dok	75,86	4 dok	75,86	4 dok	75,86	4 dok	75,86	Dinsos		
			1 06 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 dok	2 dok	23,34	2 dok	23,34	2 dok	23,34	2 dok	23,34	2 dok	23,34	2 dok	23,34	2 dok	23,34	Dinsos		
			5	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penurunan fakir miskin	1 06 21 00	Program pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase Fakir miskin yang tertangani	100%	100%	433	100%	457	100%	503	100%	553	100%	608	100%	669	Dinsos
1 06 15 01	Pelatihan tenaga pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Jumlah tenaga pendamping yang mengikuti Bimtek					43	65	200,00	65	220,00	65	242,00	65	266,20	65	292,82	65	322,10	Dinsos			
1 06 15 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh pelatihan ekonomi					1200	1200	100,00	1200	110,00	1200	121,00	1200	133,10	1200	146,41	1200	161,05	Dinsos			
1 06 15 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev					0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos	
1 06 15 08	Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Data base PMKS					9334	9334	17,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
8			1 06 17 00	Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	40%	40%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	Dinsos	Kota Bima
			1 06 17 02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih	20%	20%	21,99	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	Dinsos	
			1 06 17 06	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang memperoleh pelayanan psikososial	20%	20%	15,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	Dinsos	
9			1 06 18 xx	Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani	50%	50%	83,99	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	Dinsos	Kota Bima
			1 06 18 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	50 org	50 org	83,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos	
10			1 06 20 xx	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80	80	23,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos	Kota Bima
			1 06 20 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	20%	20%	23,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
11			1 06 16 00	Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial	80	0	0	60%	653,1327	72%	718,44597	60%	790,290567	80%	869,319624	80%	915,008195	Dinsos	Kota Bima
			1 06 16 10	Bantuan sosial bencana	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	20%	20%	213,25	40%	234,57	50%	258,03	60%	283,83	80%	312,21	80%	312,21	Dinsos	
			1 06 16 11	Monitoring, evaluasi dan laporan	Laporan movev	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos	
			1 06 16 12	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	6263 kk	0	0,00	6500 kk	317,35	6645 kk	349,09	6745 kk	383,99	8745 kk	422,39	8745 kk	464,63	Dinsos	
			1 06 16 13	Pelaksanaan Kegiatan Keserasian Sosial	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	1 klmpk	0	0,00	2 klmpk	22,38	3 klmpk	24,62	3 klmpk	27,08	5 klmpk	29,79	5 klmpk	29,79	Dinsos	
			1 06 16 14	Pelayanan JKN-PBI	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	34.147 org	0	0,00	34.147 org	31,36	35.000 org	34,50	40.000 org	37,95	45.000 org	41,74	45.000 org	41,74	Dinsos	
			1 06 16 15	Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	20%	0	0,00	20%	21,56	22%	23,71	25%	26,08	50%	28,69	50%	28,69	Dinsos	
			1 06 16 16	Sosialisasi UGB	Basis data dana bantuan sosial	1 laporan	0	0,00	1 laporan	25,92	1 laporan	28,51	1 laporan	31,36	1 laporan	34,49	1 laporan	37,94	Dinsos	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
12			1 06 17 00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan rehabilitasi Sosial	80%	80%	0,00	80%	36,99	80%	40,69	80%	44,76	80%	49,23	80%	54,16	Dinsos	Kota Bima
			1 06 17 02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih	20%	0	0	20%	21,99	40%	24,19	60%	26,61	80%	29,27	80%	32,20	Dinsos	
			1 06 17 06	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang memperoleh pelayanan psikososial	20%	0	0	20%	15,00	25%	16,50	30%	18,15	40%	19,97	40%	21,96	Dinsos	
			1 06 16 20	Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi Lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan dasar	15 org	0	0,00	30 org	45,00	45 org	67,50	60 org	90,00	100 org	112,50	100 org	112,50	Dinsos	
			1 06 18 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	11 org	0	0	20 org	137,90	25 org	138,20	30 org	168,20	35 org	198,20	35 org	198,20	Dinsos	
			1 06 18 05	Peningkatan Usaha ekonomi Produktif bagi penyandang Cacat	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan uep	0	0	0	20	200,00	30	300,00	40	400,00	50	500,00	50	500,00	Dinsos	
			1 06 20 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	20%	0	0	30%	25,00	40%	27,50	50%	30,25	60%	33,28	60%	33,28	Dinsos	

Tabel T-C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bima tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Targ et NSPK	Targ et IKK	Targ et Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				80%	85%	90%	98%	100%	80%	85%	90%	98%	100%	80%	85%	90%	98%	100%
	cakupan surat yang terkirim				1200	1250	1300	1400	1500	1200	1250	1300	1400	1442	100	100	100	100	96,13333
	cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas				4	6	8	8	10	4	6	8	8	10	100	100	100	100	100
	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan				12	12	12	10	11	12	12	12	10	11	100	100	100	100	100
	Cakupan ruang kantor yang bersih				0	0	510	550	565	0	0	510	550	565	0	0	100	100	100
	Cakupan penyediaan ATK				31	30	31	32	50	31	30	31	32	50	100	100	100	100	100
	Cakupan penggandaan dan cetak bahan				37.000	38.000	40.000	45.000	47.250	35.000	37.000	39.500	45.000	47.250	94	97	98,75	100	100
	Cakupan komponen intalasi listrik				12	12	12	6	6	12	12	12	6	6	100	100	100	100	100
	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor				6	7	7	8	8	5	6	6	7	8	83	85	85	87,5	100
	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100
	Cakupan kerjasama dengan media				5	5	6	7	8	5	5	6	7	7	100	100	100	100	87,5
	Cakupan Kegiatan makan minum rapat				25	30	45	50	55	30	30	45	50	55	120	100	100	100	100
	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				60	75	75	75	80	60	75	75	75	80	100	100	100	100	100
	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				0	0	50	55	62	0	0	50	55	62	0	0	100	100	100
2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur				83%	84%	100%	98%	87%	83%	84%	100%	98%	87%	83%	84%	100%	98%	87%
	Jumlah kendaraan dinas baru				0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	100	0	100	100
	Jumlah Perlengkapan gedung kantor				25	25	30	30	35	25	25	30	30	35	100	100	100	100	100
	Jumlah mebeleur				5	0	5	6	6	5	0	5	6	6	100	0	100	100	100
	Cakupan gedung kantor yang direhab/pelihara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Persentase pegawai yang disiplin				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap				27 stel	26 stel	27 stel	0%	0%	27 stel	26 stel	27 stel	0%	0%	27 stel	26 stel	27 stel	0	0
	Persentase pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu				0	0	0	0	40 stel	0	0	0	0	40 stel	0	0	0	0	40 stel
	Persentase pegawai yang memakai seragam olahraga				27 stel	26 stel	27 stel	0	0	27 stel	26 stel	27 stel	0	0	27 stel	26 stel	27 stel	0	0
4	Nilai LKIP OPD				CC	B	B	BB	A	CC	B	B	BB	A	CC	B	B	BB	A
	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD				2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Jumlah dokumen pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				0	2 dok	0	2 dok	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	2 dok

No	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja				5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan				5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
5	Persentase penurunan fakir miskin				100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
	Jumlah tenaga pendamping sosial yang mengikuti pelatihan				43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100	100	100	100	100
	Jumlah Keluarga Miskin yang mengikuti				120	120	120	60	60	120	120	120	60	60	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Movev				0	1 laporan	0	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan
	Jumlah PMKS seluruhnya				0	0	9334	9334	9334	0	0	9334	9334	9334	0	0	100	100	100
	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial				0	0%	50 org	50 org	50 org	0	0%	50 org	50 org	50 org	0	0	0	50 org	50 org
	Jumlah fakirmiskin yang memperoleh				0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan
	Jumlah Keluarga Penerima manfaat yang memperoleh BPNT				0	0	0	8393 KK	8393 KK	0	0	0	8393 KK	8393 KK	0	0	0	8393 KK	8393 KK
6	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial				99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali	99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali	99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali
	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
	Laporan movev				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	3 laporan	4 laporan	5 laporan	6 laporan
	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan				3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3745 kk	3746 kk	3747 kk	3748 kk	3749 kk	3750 kk
	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani				2 klmpk	2 klmpk	3 klmpk	3 klmpk	5 klmpk	2 klmpk	2 klmpk	3 klmpk	3 klmpk	5 klmpk	6 klmpk	7 klmpk	8 klmpk	9 klmpk	10 klmpk
	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah				0	0	3795 KK	3745 KK	6263 KK	0	0	3795 KK	3745 KK	6263 KK	1202 KK	1203 KK	3795 KK	3745 KK	6263 KK
	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani				0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Basis data dana bantuan sosial				0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	100	100
7	Persentase penurunan jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang meningkat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak terlantar yang terlatih				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani psikososialnya				0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	80%	80%
	Laporan Movev				0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	0	0
8	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani				2 Dok	2 Dok	0	100%	100%	2 Dok	2 Dok	0	100%	100%	2 Dok	2 Dok	0	100%	100%
	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan				0	20 org	0	50 org	50 org	0	20 org	0	50 org	50 org	0	0	0	0	0
	Laporan movev				0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	0	0
9	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani				80%	80%	0%	80%	2 Dok	80%	80%	0%	80%	2 Dok	80%	80%	0%	80%	2 Dok
	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani				0%	70%	0%	80%	80%	0%	70%	0%	80%	80%	0	100	0	100	100

No	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Persentase LKS yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar				100%	2 Dok	100%	100%	100%	100%	2 Dok	100%	100%	100%	100%	2 Dok	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				19 LKS	21 LKS	21 LKS	23 LKS	27 LKS	19 LKS	21 LKS	21 LKS	23 LKS	27 LKS	19 LKS	21 LKS	21 LKS	23 LKS	27 LKS
	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah				30 org	35 org	40 org	50 org	50 org	30 org	35 org	40 org	50 org	50 org	100	100	100	100	100
	Laporan money				0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan
	Jumlah Lomba PSKS				0	0	5 keg	5 keg	5 keg	0	0	5 keg	5 keg	5 keg	0	0	5 keg	5 keg	5 keg

Tabel T-C. 24

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2014-2018

No	Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	435.918.500	514.379.199	414.555.200	510.438.450	626.411.500	426.343.320	514.044.300	445.358.700	497.938.250	619.661.000	98	100	107	98	99	498.688.612	371.994.088
	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	38.400.000	37.800.000	38.625.000	19.416.000	31.850.000	38.400.000	37.800.000	38.625.000	19.416.000	31.850.000	100	100	100	100	100	31.922.650	22.472.675
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	22.920.000	32.160.000	46.160.000	25.800.000	18.360.000	16.410.520	32.160.000	46.160.000	16.369.000	15.336.000	72	100	100	63	84	30.619.900	22.579.925
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/ operasional (jasa)	12.078.000	22.150.000	21.750.000	24.300.000	24.100.000	9.876.000	22.144.000	18.550.000	22.020.500	20.795.500	82	100	85	91	86	23.074.900	17.537.425
	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)	20.400.000	40.080.000	73.545.000	52.900.000	63.790.000	20.400.000	40.080.000	73.545.000	52.900.000	63.790.000	100	100	100	100	100	57.578.650	47.558.675
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	-	18.588.000	4.188.000	7.430.000	10.920.000	-	18.587.500	41.187.500	7.430.000	10.920.000	-	100	983	100	100	10.281.425	5.634.425
	Penyediaan alat tulis kantor	32.941.800	32.808.000	38.134.000	42.265.000	43.919.000	32.941.800	32.808.000	38.134.000	42.265.000	43.919.000	100	100	100	100	100	39.281.400	31.079.425
	Penyediaan barang cetakan dan	23.683.600	32.625.000	35.570.000	16.201.250	24.382.500	23.682.700	32.624.500	35.564.000	16.173.250	24.381.000	100	100	100	100	100	27.194.588	19.038.363
	Penyediaan komponen instalasi	1.593.100	1.593.199	1.593.200	4.488.300	5.000.000	1.593.000	1.593.100	1.593.200	4.487.500	5.000.000	100	97	100	100	100	3.168.575	2.770.300
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	32.200.000	39.130.000	48.630.000	32.250.000	38.600.000	32.200.000	39.091.000	46.300.000	32.250.000	38.320.000	100	100	95	100	99	39.652.400	29.869.925
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-	7.600.000	-	-	-	-	7.600.000	-	-	-	-	-	-	1.900.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000	4.440.000	4.440.000	3.972.000	5.760.000	900.000	4.435.000	4.440.000	3.970.000	5.760.000	63	100	100	100	100	4.652.900	3.542.925
	Penyediaan makanan dan minuman	12.048.000	19.600.000	31.920.000	20.640.000	17.400.000	12.048.000	19.600.000	31.920.000	20.640.000	17.400.000	100	100	100	100	100	22.389.900	17.489.925
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	238.214.000	233.405.000	70.000.000	197.350.800	250.000.000	237.891.300	233.161.200	69.340.000	196.652.000	249.999.500	100	100	99	100	100	187.688.850	129.337.625
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	-	63.425.100	84.730.000	-	-	-	63.365.000	84.590.000	-	-	-	100	100	21.182.475	21.182.475
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.405.000	95.357.000	115.339.400	34.265.000	59.550.000	83.513.000	95.166.000	115.004.482	33.684.427	58.970.000	391	299	398	397	497	62.902.475	39.063.325
	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	-	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-	17.421.427	17.420.000	-	-	-	97	97	4.500.000	4.499.975
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	38.183.000	21.695.000	18.695.000	1.765.000	3.650.000	38.173.000	21.545.000	18.365.000	1.765.000	3.650.000	100	99	98	100	100	11.451.150	6.027.425
	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000	-	-	-	-	7.950.000	-	-	-	-	99	-	-	-	-	25	-
	Pengadaan Mebeleur	21.800.000	16.430.000	19.330.000	-	14.900.000	20.000.000	16.389.000	19.330.000	-	14.900.000	92	100	100	-	100	8.939.925	4.832.450
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.390.000	-	20.000.000	10.000.000	10.000.000	17.390.000	-	20.000.000	10.000.000	10.000.000	100	-	100	100	100	4.999.925	4.999.950
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.032.000	57.232.000	57.314.400	4.500.000	13.000.000	-	57.232.000	57.309.482	4.498.000	13.000.000	-	100	100	100	100	33.011.500	18.703.525
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.200.000	11.100.000	20.000.000	-	-	13.200.000	11.071.000	20.000.000	-	-	100	100	100	-	-	7.774.925	4.999.950
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	40.330.000	-	-	-	-	39.580.000	-	-	-	-	98	-	-	-	25	25
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN	24.000.000	31.800.000	31.800.000	-	23.800.000	24.000.000	19.380.000	30.900.000	-	23.800.000	200	110	195	-	-	15.899.875	7.949.900
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	10.200.000	18.000.000	18.000.000	0	-	10.200.000	18.000.000	17.100.000	0	-	100	100	95	-	-	8.999.925	4.499.950
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari	-	-	-	-	23.800.000	-	-	-	-	23.800.000	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	13.800.000	13.800.000	13.800.000	-	-	13.800.000	1.380.000	13.800.000	-	-	100	10	100	-	-	6.899.950	3.449.950
4	PROGRAM PENINGKATAN	85.682.800	67.711.600	136.787.100	80.485.850	116.270.000	85.682.800	67.711.600	136.787.100	79.953.650	116.267.000	500	500	500	597	600	95.208.663	80.540.838
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	-	9.039.800	10.339.800	8.420.800	16.120.000	-	9.039.800	10.339.800	8.405.800	16.120.000	-	100	100	100	100	8.720.075	8.720.075
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.086.000	3.767.000	10.715.000	6.168.100	15.000.000	9.086.000	3.767.000	10.715.000	6.168.100	15.000.000	100	100	100	100	100	8.912.425	7.970.700
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.641.000	-	-	11.378.000	15.000.000	7.641.000	-	-	11.378.000	15.000.000	100	-	-	100	100	3.749.950	3.749.975
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir	10.826.000	8.039.000	8.151.000	18.269.000	20.000.000	10.826.000	8.039.000	8.151.000	17.752.000	20.000.000	100	100	100	97	100	13.614.650	11.604.925
	Penyusunan Rencana Kerja	43.363.500	34.623.500	77.931.000	22.500.000	31.150.000	43.363.500	34.623.500	77.931.000	22.500.000	31.147.000	100	100	100	100	100	41.551.025	32.895.175
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	14.766.300	12.242.300	29.650.300	13.749.950	19.000.000	14.766.300	12.242.300	29.650.300	13.749.750	19.000.000	100	100	100	100	100	18.660.538	15.599.988

No	Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	92.737.000	126.959.000	200.634.000	761.090.200	708.716.000	92.736.888	126.923.000	200.229.600	648.766.200	706.436.000	200	300	399	673	692	314.241.600	282.501.900
	Peningkatan Kemampuan (Capacity	-	31.544.000	22.854.000	28.944.000	21.474.000	-	31.544.000	22.804.000	28.944.000	20.974.000	-	100	100	100	98	26.203.925	18.317.925
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi	74.917.000	75.395.000	122.089.000	183.799.000	368.064.000	74.916.888	75.359.000	121.734.600	183.576.000	367.054.000	100	100	100	100	100	187.336.650	168.487.925
	Monitoring dan Evaluasi	17.820.000	20.020.000	-	10.000.000	10.000.000	17.820.000	20.020.000	-	9.990.000	9.825.000	100	100	-	100	98	7.504.925	2.499.950
	Pendataan Penyandang Masalah	-	-	38.117.000	43.722.000	5.000.000	-	-	38.117.000	43.722.000	4.875.000	-	-	100	100	98	12.180.450	12.180.450
	Penyuluhan Sosial	-	-	17.574.000	19.885.000	19.885.000	-	-	17.574.000	19.885.000	19.885.000	-	-	100	100	100	9.942.450	9.942.450
	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	-	-	-	418.000.200	244.800.000	-	-	-	305.974.200	244.650.000	-	-	-	73	100	61.199.975	61.199.975
	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	-	-	-	56.740.000	39.493.000	-	-	-	56.675.000	39.173.000	-	-	-	100	99	9.873.225	9.873.225
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	317.898.800	354.014.800	454.100.800	503.815.000	550.044.000	268.110.705	352.910.800	452.267.800	487.656.334	530.224.500	292	399	298	391	676	442.610.275	354.106.675
	Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	73.068.800	115.142.800	219.445.800	168.934.000	163.234.000	73.068.800	115.142.800	218.392.800	160.554.000	154.184.000	100	100	100	95	94	166.689.050	137.903.375
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.180.000	13.530.000	-	10.000.000	10.000.000	17.180.000	13.530.000	-	9.895.000	9.940.000	100	100	-	99	99	5.882.425	2.499.950
	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	193.650.000	200.000.000	209.665.000	300.000.000	272.897.000	177.861.905	198.906.000	209.335.000	292.426.334	266.287.500	92	99	100	97	98	245.640.400	195.640.425
	Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	34.000.000	25.342.000	24.990.000	24.881.000	22.381.000	-	25.332.000	24.540.000	24.781.000	22.381.000	-	100	98	100	100	24.398.400	18.062.925
	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	-	-	-	-	31.200.000	-	-	-	-	29.700.000	-	-	-	-	95	-	-
	Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	-	-	-	-	22.616.000	-	-	-	-	21.016.000	-	-	-	-	93	-	-
	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	-	-	-	-	27.716.000	-	-	-	-	26.716.000	-	-	-	-	96	-	-
7	Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	7.447.500	11.996.000	14.606.000	21.990.000	46.990.000	7.447.500	11.996.000	14.606.000	21.990.000	46.990.000	100	100	100	100	300	17.645.400	14.646.425
	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	7.447.500	11.996.000	14.606.000	21.990.000	21.990.000	7.447.500	11.996.000	14.606.000	21.990.000	21.990.000	100	100	100	100	100	17.645.400	14.646.425
	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100	-	-
	Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100	-	-
8	Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	11.470.000	12.605.000	-	37.165.000	22.865.000	11.470.000	12.605.000	-	37.126.000	22.800.000	100	100	-	200	199	8.867.400	5.716.175
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	-	-	-	27.165.000	17.865.000	-	-	-	27.126.000	17.865.000	-	-	-	100	100	4.466.225	4.466.225
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.470.000	12.605.000	-	10.000.000	5.000.000	11.470.000	12.605.000	-	10.000.000	4.935.000	100	100	-	100	99	4.401.175	1.249.950
9	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK,	12.314.500	13.887.000	-	27.996.000	22.996.500	12.314.500	-	-	27.931.500	22.996.500	100	-	-	100	100	9.220.800	5.749.075
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	12.314.500	13.887.000	-	27.996.000	22.996.500	12.314.500	-	-	27.931.500	22.996.500	100	-	-	100	100	9.220.800	5.749.075
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	92.347.400	124.881.000	158.782.000	151.417.000	137.357.000	88.347.400	124.881.000	158.692.000	151.252.000	133.222.000	96	300	299	399	391	123.255.725	108.138.750
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	-	16.014.000	16.490.000	21.779.000	20.579.000	-	16.014.000	16.400.000	21.779.000	20.579.000	-	100	99	100	100	14.711.925	14.711.925

No	Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	92.347.400	60.468.000	92.857.000	59.111.000	58.461.000	88.347.400	60.468.000	92.857.000	59.006.000	58.356.000	96	100	100	100	100	67.724.150	52.607.175
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	48.399.000	49.435.000	55.527.000	43.317.000	-	48.399.000	49.435.000	55.527.000	39.287.000	-	100	100	100	91	37.069.675	37.069.675
	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	14.940.000	15.000.000	-	-	-	100	100	3.749.975	3.749.975
	TOTAL	1.216.221.500	1.353.590.599	1.526.604.500	2.128.662.500	2.315.000.000	1.099.966.113	1.325.617.700	1.553.845.682	1.986.298.361	2.281.367.000							